

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan (RKPD).

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah perlu memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional (Propinsi Jawa Timur); pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD); pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif daerah; dan isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2015 sehingga masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai, nama program, SKPD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya, untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 mempunyai satu visi yang dijabarkan dalam dua misi dan lima tujuan

pembangunan. Dalam pelaksanaannya, visi, misi dan tujuan pembangunan tersebut diarahkan pada sepuluh sasaran pembangunan yang akan dicapai selama 5 tahun perencanaan.

Adapun hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan Dan Berakhlak Mulia	1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, Dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan	1. Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berbasis Kerakyatan	1. Peningkatan Perekonomian Daerah
		2. Meningkatnya Daya Saing Daerah	2. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	2. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat	4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah
		5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
			6. Peningkatan Kualitas Pendidikan
			7. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat
			8. Peningkatan Kualitas Sanitasi Perumahan dan Permukiman
			9. Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat
			10. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Sumber: RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018

Dalam Tabel 4.1. dapat dijelaskan bahwa Visi Kabupaten Probolinggo pada kurun waktu 5 lima tahun (tahun 2013 – 2018), secara sederhana

dijelaskan melalui dua misi, yaitu misi untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.

Untuk kedua misi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) tujuan pembangunan dimana 3 (tiga) tujuan untuk misi pertama dan 2 (dua) tujuan untuk misi kedua. Guna mensejahterakan masyarakatnya, maka tujuan pembangunan pertama adalah meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dengan sasaran peningkatan perekonomian daerah, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor/sub sektor dan pemantapan ketahanan pangan, peningkatan kemandirian usaha koperasi dan UMKM serta pengembangan komoditas unggulan. Tujuan kedua adalah meningkatkan daya saing daerah dengan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah. Tujuan ketiga adalah pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Guna mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maka terdapat 2 (dua) tujuan pembangunan yaitu pertama meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan sasaran peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat serta peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman melalui percepatan peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dengan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo maka tema pembangunan Tahun 2015 adalah :

***“MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH BAGI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”***

4.2. Prioritas Pembangunan

Seperti telah disampaikan di awal bab ini, maka perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015, perlu untuk

dikorelasikan dengan beberapa aspek. Berikut adalah identifikasi dari aspek-aspek tersebut.

4.2.1. Pencapaian Pembangunan MDG's

Indikator Tingkat pencapaian MDG's adalah:

1. Memberantas Kemiskinan Dan Kelaparan, Program yang dilaksanakan dalam indikator ini adalah:
 - Penurunan Angka Kemiskinan dan Kelaparan,
 - Perbaikan Gizi Masyarakat.
2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua, program yang dilaksanakan dalam indikator ini adalah: Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI.
3. Mendorong Kestaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, program yang dilaksanakan dalam indikator ini adalah:
 - Pendidikan untuk semua,
 - Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Menurunkan Angka Kematian Anak, program yang dilaksanakan dalam indikator ini adalah Penurunan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu, program yang dilaksanakan dalam indikator ini adalah:
 - Penurunan Angka Kematian Ibu,
 - Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Mengendalikan Hiv Dan Aids, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya (Tb), program yang dilaksanakan dalam indikator ini adalah:
 - Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS,
 - Pengendalian Penyakit Malaria
 - Pengendalian Penyakit TB
7. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup, program yang dilaksanakan dalam indikator ini adalah:
 - Peningkatan akses penduduk terhadap air minum yang layak
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak

- Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
- Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
- Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
- Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
- Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
- Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
- Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
- Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah
- Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Ditjen Sumber Daya Air
- Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
- Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJM periode ke-3 (2015 – 2019) disebutkan :

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan

dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan

dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Adapun tema pembangunan Nasional pada tahun 2015 adalah :

**“MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN”**

Isu strategis pembangunan Nasional tahun 2015 adalah :

- **BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**
 1. Pengendalian Jumlah Penduduk
 2. Reformasi Pembangunan Kesehatan
 - a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
 - b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
 3. Reformasi Pembangunan Pendidikan
 4. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- **BIDANG EKONOMI**

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas
6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
7. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
9. Reformasi Keuangan Negara
- **BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**
 10. Peningkatan Kapasitas Iptek
- **BIDANG SARANA DAN PRASARANA**
 11. Peningkatan Ketahanan Air
 12. Penguatan Konektivitas Nasional
 - a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
 - b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
 - c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
 13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
 - b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
 - c. Penataan Perumahan/Permukiman
- **BIDANG POLITIK**
 14. Konsolidasi Demokrasi
- **BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**
 15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
 16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
- **BIDANG HUKUM DAN APARATUR**
 17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
 18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- **BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG**
 19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
 20. Pengelolaan Risiko Bencana
 21. Sinergi Pembangunan Perdesaan
- **BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN**
 22. Perkuatan Ketahanan Pangan
 23. Peningkatan Ketahanan Energi
 24. Percepatan Pembangunan Kelautan
 25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, RPJM periode ke-3 (2015 – 2019) disebutkan :

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.

Pada tahap ketiga ini, pembangunan industri diarahkan pada penguatan industri manufaktur sejalan dengan pengembangan kawasan klaster industri yang didukung penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan mengembangkan industri kecil yang tangguh. Sedangkan pembangunan perdagangan di arahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif. melalui perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan pendayagunaan kekayaan dan aset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan fasilitasi kepada daerah dan masyarakat untuk mampu berperan sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdaya masyarakat. Hal ini dilakukan dengan advokasi dan insentif dalam rangka kemandirian, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan umum. Sedangkan pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya konstruksi hukum yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan berdasarkan prinsip pnnslp konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi.

Untuk pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perluasan

akses transportasi yang menjangkau wilayah perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan wilayah didasarkan pada penataan ruang semakin baik dengan meningkatnya implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin mantapnya sistem pengendalian. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan pada masa yang akan datang.

Adapun tema pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah :

“PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI JAWA TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN INDUSTRI HULU-HILIR, AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI, UMKM SERTA INFRASTRUKTUR”

Adapun isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah :

1. Kondisi Makro Ekonomi Global Yang Belum Pulih, berdampak:
 - a. Nasional : Melambatnya Pertumbuhan Nasional di 2013 : 5,78%, Neraca Transaksi Berjalan Nasional masih Defisit.
 - b. Jawa Timur : Ekonomi Tumbuh melambat posisi 6,55% (lebih cepat dari nasional), Neraca Perdagangan Surplus 53,7 Trilyun, Realisasi Investasi 145,06 Trilyun (tumbuh 8,72 %).
2. Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/ penolong (83,34%). Solusinya adalah dengan industri substitusi impor/industri dasar.
3. Kemandirian Pangan, yaitu Padi (melalui Peningkatan IP dari 1,86 ke 2,3) bersama Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan menuju surplus 10 juta ton, Daging : melalui IB dengan 1,5 juta akseptor Sapi, bersama NTB, NTT dan Lampung untuk memenuhi kekurangan kebutuhan daging nasional 132.000 ton/tahun.
4. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 sehingga diperlukan daya saing daerah baik Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur dasar, Infrastruktur regulasi, Infrastruktur keuangan maupun Pelayanan Publik.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Probolinggo

Sementara itu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 dan Prioritas Pembangunan Nasional, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 adalah:

1. Kesehatan;
2. Pendidikan;
3. Ketahanan Pangan
4. Revitalisasi Pertanian;
5. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran;
6. Iklim Investasi Dan Usaha;
7. Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana
8. Infrastruktur Daerah
9. Perumahan Dan Sanitasi Permukiman
10. Pengembangan IKM Dan Perdagangan
11. Koperasi Dan UMKM;
12. Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
13. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel.

4.2.5. Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis dalam RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah:

1. Diberlakukannya AEC (Asean Economic Comitte) dan AFTA (Asean Free Trade Area) ;
2. Periode terakhir MDG'S ;
3. Diberlakukannya peraturan perundangan yang baru (UU Desa dan UU ASN) ;
4. Transformasi program-program penanggulangan kemiskinan ;
5. Diberlakukannya BPJS Ketenagakerjaan.

4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Target Sasaran serta Program dalam RPJMD

Keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan indikator dan target sasaran pembangunan serta program-program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

